



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Pkc

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1404160902790001, tempat lahir Bungan Tampean, tanggal lahir 09 Februari 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxx xxxx, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxx xxxx sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1401136xx4880006, tempat lahir Muara Rumbai, tanggal lahir 12 Mei 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxx xxxx sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili elektronik pada alamat email ghinafitriaannisa@gmail.com dan selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

xx4Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor xx1/Pdt.P/2024/PA.Pkc pada 19 Desember

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor xx1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2017, dengan tata cara agama Islam di xxx xxx RW.006, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan Wali Saudara Laki-laki Kandung Pemohon II yang di bernama Ilman Saputra bin Jalius dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Jasri dan Firdaus
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langsungkan karena Pemohon I dan Pemohon II Menikah secara Siri;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah tempat tinggal bersama di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu (2) orang anak yang bernama
xx4a. Kayla Amira Maritza lahir tanggal 05 Desember 2018;
b. Adilah Nisa Ardam, lahir tanggal 13 April 2020;
7. Bahwa permohonan istbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk pengurusan kartu nikah dan untuk mengurus akta kelahiran dan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor xx1/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. xx4Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

xx4Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. xx4Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 3) dan Pemohon II (PEMOHON 4) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 19 September 2017, dengan tata cara agama Islam di xxx xxx RW.006, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

xx4Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

xx4Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. xx4Bukti Surat

1. xx4Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I,

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor xx1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 1404160902790001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx
xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegeben* di Kantor Pos,
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal,
paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK
1401136xx4880006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx
xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegeben* di Kantor Pos,
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal,
paraf dan tanda P.2;

B. xx4Bukti Saksi

1. xx4M. **Supawi bin**, tempat lahir Montong Terap, tanggal lahir 05 Juni
1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,
tempat tinggal di Pulau Muda, xxx xxx xxx xxx, hubungan Saksi dengan
Para Pemohon sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
 - xx4Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah
secara agama Islam pada tanggal 19 September 2017 di xxx xxx
RW.006, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan status
Pemohon II adalah perawan;
 - xx4Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah
Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang di bernama
Ilman Saputra bin Jalius karena saat itu ayah kandung dan kakek dari
pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa
seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi
laki-laki masing-masing bernama Jasri dan Firdaus;
 - xx4Bahwa saat pernikahan tersebut, saudara kandung Pemohon II
langsung yang melakukan *ijab qobul* dengan Pemohon I sebagai
pengantin laki-laki;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor xx1/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xx4Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tetap beragama Islam;
 - xx4Bahwa selama menikah, Para Pemohon Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu (2) orang anak;
 - xx4Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
 - Bahwa penyebab Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
2. xx4**Nasril bin Jamaludin**, tempat lahir Kuala Panduk, tanggal lahir 02 Januari 1973, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xx, RT. 001 RW. 0xx, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- xx4Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 September 2017 di xxx xxx RW.006, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
 - xx4Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ilman

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor xx1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Saputra bin Jalius karena saat itu ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Jasri dan Firdaus;

- Bahwa saat pernikahan tersebut, saudara kandung Pemohon II langsung yang melakukan *ijab qobul* dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu (2) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
- Bahwa penyebab Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor xx1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan/menyangkal/mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

xx4Kewenangan Mengadili

xx4Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

xx4Kewenangan dan Kepentingan Hukum

xx4Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Pemohon di persidangan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima personae standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

xx4Pokok Permohonan

xx4Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- xx4Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilangsungkan secara agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Para Pemohon;
- xx4Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor xx1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

xx4 Analisis Pembuktian

xx4 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor xx Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P.1 sampai dengan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor xx Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Para Pemohon. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

xx4 Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

xx4 Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, menerangkan di bawah sumpah serta tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg);

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor xx1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

xx4Fakta Hukum

xx4Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

xx4Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 September 2017 di xxx xxx RW.006, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan berwalikan wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Ilman Saputra bin Jalius yang ijab qobulnya dilakukan secara langsung antara wali Pemohon II dan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Jasri dan Firdaus;

xx4Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon masing-masing berstatus sebagai jejaka dan perawan, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah beristrikan wanita lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak pernah bersuamikan laki-laki lain selain Pemohon I;

Bahwa selama menikah, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dan memperlumaskan pernikahan Para Pemohon;

xx4Bahwa selama menikah, Para Pemohon Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu (2) orang anak;

xx4Bahwa selama menikah, Para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor xx1/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa maksud dan tujuan pengajuan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

xx4**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

xx4Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Para Pemohon, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

xx4Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, dan 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal xx ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

xx4Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan xx Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *l'annah al-Thalibin* dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

xx4

xx4Artinya:



xx4“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar’iyah dalam kitab yang sama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

xx8

Artinya:

“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;”

xx4Kesimpulan

xx4Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal xx Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

xx4Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5



Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Para Pemohon bertempat tinggal;

xx4Biaya Perkara

xx4Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

xx4Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

xx4Amar Penetapan

xx4MENETAPKAN:

- xx4Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- xx4Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 3**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 4**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017 di xxx xxx RW.006, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;
- xx4Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

xx4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx4Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.** dan **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Jufriddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Panitera,

Jufriddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rpxx.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor xx1/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)